



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 Juli 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 19.40 WIB s.d 22.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK. V)
Acara	: Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2011
Ketua Rapat	: Nusyirwan Soejono, ST
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Para Pejabat Eselon I Kementerian Perumahan Rakyat beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua membuka rapat pukul 19.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perumahan Rakyat pada hari ini adalah pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mengenai perubahan RKA Kementerian Perumahan Rakyat dalam APBN-P 2011.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat agar pemanfaatan dari penghematan, sisa tender dan tambahan anggaran pada APBN-P 2011 sesuai dengan ketentuan Inpres No. 7 Tahun 2011, diutamakan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dukungan penyelesaian pembangunan secara tuntas agar berfungsi penuh;
 - b. Mendesak dan strategis;
 - c. Dapat dilaksanakan dalam waktu singkat;
 - d. Ditempatkan pada unit kerja *progress* tinggi sebagai bentuk *reward*; dan
 - e. Manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat agar hasil penghematan, sisa tender, dan *reward* dimanfaatkan untuk kegiatan/sub kegiatannya dibahas dengan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 452 Miliar sesuai dengan Nota Keuangan APBN-P 2011 dan dibahas dengan Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera meninjau ulang Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
5. Komisi V DPR RI mendukung keputusan Kementerian Perumahan Rakyat bahwa untuk TA. 2011, pembangunan rumah rusak berat masuk klasifikasi pembangunan rumah baru.
6. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera merevisi Surat Keputusan Menteri No.18 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.25 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2011

**SEKRETARIS MENTERI
PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

Dr. ISKANDAR SALEH

KETUA RAPAT,

TTD

NUSYIRWAN SOEJONO, ST